

---

## Efek Panoptikon Orde Baru dalam *Cerkak* Berjudul *Seksi Saka Menara* Karya Suparto Brata

Ajeng Aisyah Fitria<sup>1\*</sup>, Ardian Nugraha Priyatama<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Komunitas Jangkah Nusantara, Indonesia

<sup>2</sup>Komunitas Kandang Kebo, Indonesia

Korespondensi: ajengaisyah00@mail.ugm.ac.id

---

### Abstract

*The ruling state employs various methods to control its citizens, both through legal institutions and through entities deemed "safe," such as schools and hospitals. This form of power ultimately creates what is known as the panopticon effect—a phenomenon where individuals feel as though they are constantly being watched, leading them to exercise caution to avoid committing unlawful acts. This concept is illustrated in the short story "Seksi Saka Menara" or "Witness from the Tower" by Suparto Brata. To explore this social phenomenon in depth, the research utilizes Foucault's panopticon theory. The methodology employed in this article is qualitative, incorporating data collection techniques that include a literature review. The data consists of quotations from the short story relevant to the panopticon effect. The results of this study indicate that the character Poniran becomes increasingly troubled and paranoid, leading him to entertain irrational speculations as a result of the panopticon effect. One of his excessive speculations is the belief that the police can track money circulation through its serial numbers. The panopticon effect causes Poniran to feel constantly monitored, thereby discouraging him from committing dishonorable acts. The sources of this effect in the short story include religion, society, culture, and the New Order government.*

**Keywords:** Suparto Brata, Short Story, Panopticon, The New Order, Foucault

### Abstrak

Negara yang berkuasa menggunakan berbagai cara untuk mengatur rakyatnya, baik melalui lembaga hukum maupun melalui lembaga yang dinilai "bersih", seperti sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Bentuk kekuasaan tersebut pada akhirnya melahirkan efek panoptikon, yaitu sebuah efek ketika seseorang selalu merasa diawasi dan akhirnya berhati-hati agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Hal tersebut terrepresentasikan dalam *cerkak* berjudul *Seksi saka Menara* atau *Saksi dari Menara* karya Suparto Brata. Untuk menyingkap fenomena sosial tersebut dengan detail, maka digunakan teori panoptikon Foucault. Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka. Datanya berupa kutipan-kutipan dalam *cerkak* yang berhubungan dengan efek panoptikon. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, tokoh Poniran menjadi sangat gundah hingga memikirkan spekulasi-spekulasi tidak masuk akal dikarenakan secara tidak sadar dirinya telah terkena efek panoptikon. Salah satu spekulasi berlebihan tersebut adalah tokoh Poniran berpikir bahwa polisi dapat melacak pengedaran uang melalui nomor seri uang. Efek panoptikon membuat tokoh Poniran merasa diawasi sehingga tidak dapat dengan mudah melakukan perbuatan tercela. Sumber dari efek panoptikon dalam *cerkak* ini adalah agama, adat istiadat masyarakat, dan lembaga negara orde baru.

**Kata Kunci:** Suparto Brata, Cerkak, Panoptikon, Orde Baru, Foucault

---

### PENDAHULUAN

Negara merupakan sebuah organisasi dengan kekuasaan tertinggi terhadap suatu wilayah. Dalam hal ini, negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki hak penuh dalam mengatur rakyatnya, yaitu dengan menerbitkan peraturan serta menciptakan penegak hukum. Secara

eksplisit, kekuasaan hanya dijalankan melalui sistem-sistem penegak hukum. Akan tetapi, menurut Foucault (1978:93) kekuasaan ada di mana-mana karena dapat berasal dari mana pun dan tidak hanya dimiliki oleh suatu kelompok tertentu. Kemudian Foucault dalam Mills (2001:20-22) berpendapat bahwa kekuasaan tidak dapat dilihat hanya sebagai sebuah kepemilikan atau usaha untuk menaklukkan orang lain. Lebih dari itu, kekuasaan merupakan suatu hal yang berada di antara hubungan-hubungan sosial antar individu yang artinya setiap ada hubungan atau relasi, pasti ada kekuasaan di sana.

Kekuasaan tersebut secara tidak disadari tertanam di setiap individu hingga melahirkan individu yang patuh terhadap kekuasaan. Dalam hal ini, hukuman juga berperan dalam menjadikan kepatuhan tersebut kuat hingga memunculkan ketakutan untuk melanggar karena merasa selalu diawasi oleh kekuasaan. Hal ini oleh Foucault (1977:202) disebut dengan panoptikon, yaitu ketika kekuasaan berfungsi secara otomatis. Relasi kuasa yang tak disadari ini terepresentasikan dalam salah satu *cerkak* karya Suparto Brata berjudul *Seksi saka Menara* yang dimuat dalam buku *Trem Antologi Cita Cerkak* (2000). *Cerkak* ini menceritakan kisah seorang tokoh bernama Poniran yang bekerja untuk menjaga sinyal kereta. Sayangnya kehidupannya penuh keterbatasan hingga dirinya tidak mampu membayar biaya ujian anaknya untuk masuk SMA. Pada suatu malam ketika Poniran sedang berjaga, ia melihat ada dua orang yang sedang berkejar-kejaran merunut jalur rel. Mereka berkelahi hingga Si Baju Merah membunuh Si Baju Hijau, merebut tasnya, kemudian melemparnya, dan melarikan diri karena melihat kereta datang. Tak lama kemudian banyak polisi datang untuk melakukan investigasi. Poniran yang melihat dari atas menara menunggu situasi sepi kemudian mengambil tas yang dibuang tersebut. Ternyata tas itu berisi berlembar-lembar uang. Seketika ia langsung berseri-seri karena teringat anaknya yang sebentar lagi perlu mendaftar SMA, tetapi terancam tidak bisa lanjut karena masalah finansial. Ia memutuskan untuk menunggu situasi reda sebelum membawa pulang uang tersebut. Akan tetapi, berbulan-bulan kemudian Poniran tetap tidak berani menggunakan uang tersebut karena ketakutan akan dicituk oleh polisi. Hingga suatu hari ia menyerahkan tas uang tersebut kepada polisi tanpa mengambil sepeser pun.

Dari garis besar isi cerita, terdapat masalah yang masih perlu dijelaskan, yaitu bagaimana efek panoptikon terjadi pada tokoh Poniran? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab dari efek panoptikon. Harapannya dapat membuka mata masyarakat bahwa tangan-tangan kuasa bekerja di mana-mana hingga mempengaruhi psikis dan tindakan individu. Beberapa kajian sebelumnya mengenai teori panoptikon ini dilakukan oleh Iqbal (2019) yang menyoroti pelarangan buku di Era Orde Baru. Pada masa tersebut memperlihatkan ketakutan penguasa atas cara berpikir masyarakat. Hal ini juga berhubungan dengan upaya pemerintah dalam menyensor isi buku yang akan diterbitkan supaya sejalan dengan kehendak pemerintah. Kemudian kajian selanjutnya dilakukan oleh Bashirah (2018) yang meneliti sistem panoptikon pada *Sibyl System* dalam anime *Psycho-Pass*. Dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwa *Sibyl System* diterapkan secara halus sehingga masyarakat menanggapinya dengan positif sebagai bagian dari sistem pemerintah yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Akan tetapi, adanya pengawasan panoptikon membuat *Sibyl System* semakin kuat di masyarakat. Dari dua penelitian di atas keduanya tidak membahas mengenai lembaga maupun pranata yang sering dianggap “bebas” dari sistem kuasa. Oleh karena itu, pada kajian ini peneliti tidak hanya fokus pada bentuk-bentuk panoptikon, tetapi juga hal-hal yang melatarbelakanginya.

Untuk dapat membedah *cerkak* tersebut diperlukan teori yang sesuai, yaitu teori panoptikon yang digagas oleh Michel Foucault. Sebelum masuk pada teori mengenai panoptikon,

pertama-tama perlu dibahas mengenai konsep *power* atau kekuasaan dari Foucault. Menurut Edkins dan Nick (2019:216) konsep *power* didefinisikan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh negara dan bersifat terpusat. Akan tetapi, model kekuasaan terpusat ini dibantah oleh Foucault (1980:207) dengan teorinya, yaitu *dispersed power* atau kekuasaan yang tersebar dengan digambarkan sebagai sesuatu yang tidak terpusat dan tidak mengekspresikan dirinya melalui strategi-strategi besar. Dengan demikian, Foucault (1978:98) menekankan bahwa individu bukanlah pihak yang ditekan oleh kekuasaan melainkan suatu contoh kekuasaan. Kekuasaan yang ada dalam setiap relasi itu dapat terjadi karena setiap orang cenderung untuk menegaskan posisinya, baik sebagai pihak yang kuat dan dominan maupun sebagai pihak yang lemah. Hal inilah yang kemudian memunculkan efek kuasa.

Kekuasaan yang tersebar tersebut dicontohkan oleh Foucault (1977:138) bahwa *power* mempengaruhi pendidikan, rumah sakit, dan barak militer yang kemudian menciptakan disiplin hingga membuat "tubuh-tubuh patuh". Hal ini tidak hanya diperlihatkan dari hubungan antara guru dan murid maupun dokter dan perawat atau hubungan antara yang lebih superior kepada yang lebih inferior, melainkan juga diperlihatkan melalui jadwal-jadwal yang perlu dipatuhi oleh setiap tubuh. Bahkan Foucault (1980:40; 2017:52) menyamakan tempat-tempat tersebut sebagai penjara yang digunakan sebagai instrumen untuk membentuk individu menjadi subjek yang taat. Adanya pendisiplinan ditambah dengan instrumen-instrumen penegak hukum maupun sistem pengawasan menjadikan individu terus merasa terawasi sekalipun di kawasan terpencil. Hal ini menimbulkan efek panoptikon yang didefinisikan sebagai *unequal gaze* atau tatapan tidak setara karena dapat melakukan pengawasan secara terus-menerus.

Pada awalnya, panoptikon adalah bentuk arsitektur penjara yang digagas oleh Jeremy Bentham (1791:5-12) dengan sel-sel yang melingkar dan menara pengawas di tengah serta lampu yang berputar 360 derajat secara acak hingga tercipta ilusi bahwa pengawas selalu menyoroti sel setiap waktu. Desain arsitektur tersebut membuat para tahanan akan merasa selalu diawasi karena mereka tidak dapat melihat isi dari loji pengawas sehingga pada lingkungan ini tercipta kesenjangan kuasa antara sel tahanan dan pengawas. Dalam perspektif tahanan, para sipir memiliki kuasa yang selalu ada walaupun pada kenyataannya tidak selalu demikian. Hal ini disebabkan oleh ilusi sorotan lampu acak. Bentuk arsitektur ini oleh Bentham tidak hanya disarankan untuk digunakan sebagai penjara saja, melainkan dapat pula digunakan pada berbagai institusi sosial lainnya.

Desain panoptikon ini kemudian secara tidak disadari telah diterapkan dalam kehidupan modern dan menjadi suatu model yang digeneralisasi dalam konteks kehidupan sehari-hari (Foucault, 1977:205). Hal ini menjadi metafora bagi tubuh-tubuh patuh. Oleh karena itu, panoptikon menciptakan kesadaran akan pengawasan yang permanen dalam setiap tubuh sehingga menjamin berfungsinya kekuasaan secara otomatis (Foucault, 1977:201). Tidak hanya itu, struktur hierarkis dalam suatu lembaga maupun kelompok masyarakat juga menciptakan kondisi yang mirip dengan desain panoptikon ini. Para guru maupun tenaga medis bertugas untuk menciptakan "*docile bodies*" atau "tubuh-tubuh yang jinak, tetapi cakap" yang secara terus-menerus harus didisiplinkan (Foucault, 1977:294). Hal ini juga berlaku di masyarakat ketika adat istiadat diterapkan dan pendisiplinan dilakukan dengan hukuman sosial. Pada akhirnya lembaga-lembaga tersebut menjadi perpanjangan tangan bagi para penegak hukum untuk mendisiplinkan masyarakatnya. Menurut Brunon-Ernst, et.al. (2023:114), panopticon membawakan sebuah perspektif baru pada konsep kuasa, yaitu sistem hukuman yang bertujuan sebagai alat pencegahan tindak kejahatan. Semua bentuk pelanggaran diidentifikasi secara sistematis

dengan hukuman konstan dan proporsional diterapkan ke semua bentuk pelanggaran yang sama. Selain itu, sistem panoptikon memperkenalkan “akuntabilitas” untuk memperlihatkan bahwa sistem ini tidak akan berlaku secara semena-mena karena semua bentuk dan proses hukuman, sang penghukum, dan sang terhukum dapat dilihat secara transparan.

Secara tipologi, Semple (1987:35 - 44) menjelaskan bahwa (1) tahanan diawasi oleh sipir; (2) inspektur mengawasi sipir; (3) sipir mengawasi inspektur; (4) tahanan mengontrol satu sama lain; dan terakhir (5) terbuka untuk publik. Dari desain arsitektur bangunan tersebut tidak hanya terjadi pengawasan dari pusat menara, tetapi juga memungkinkan terjadinya pengawasan antara satu sel ke bagian lainnya dalam panoptikon tersebut. Artinya, sistem panoptikon ini tidak hanya merevolusionerkan sistem hukuman yang dahulu sangat kejam dan terpusat pada negara, tetapi sistem ini juga memberi insentif terhadap semua individu di dalamnya untuk menegakkan kontrol secara horizontal. Transparansi penegakan hukuman menimbulkan rasa takut, tetapi juga menjadi tolok ukur bagi tahanan lain agar proses hukuman selanjutnya berlangsung proporsional dengan tidak terlalu kejam juga tidak terlalu ringan. Semple (1987:37) dalam tulisannya mengatakan bahwa kekejaman penjara dan proses-proses hukuman pada umumnya di era tersebut memberikan ilusi bahwa sistem transparansi serta akuntabilitas panoptikon ini “lebih baik” dan menjanjikan para tahanan perlakuan humanis sebagai hadiah atas kepatuhan. Sistem panoptikon justru merusak persatuan para tahanan karena sel-sel transparan meningkatkan individualisme sehingga tidak ada lagi rasa “saling membela” antara satu sama lain. Hal ini yang membuat para tahanan bisa mengontrol satu sama lain dengan melaporkan mereka ke sipir atas pelanggaran serta menimbulkan rasa paranoia terhadap mereka yang berniat untuk melanggar peraturan. Hal ini yang menjadi kacamata analisis untuk mengkaji masalah yang timbul dalam cerkak ini, yaitu efek panoptik yang terinternalisasi dari diri sendiri, horizontal, dan ketakutan terhadap kuasa negara.

Dalam hal ini panoptikon yang bekerja dalam lingkup sosial tidak hanya menjadi momok bagi kehidupan bermasyarakat, tetapi secara tidak disadari juga mempengaruhi penulisan karya sastra. Teori panoptikon sebagai bagian dari teori sosiologi menangkap fenomena kesusastraan yang mencerminkan keadaan sosial pada saat itu. Penerapan panoptikon dalam karya sastra terlihat dari pengawasan narasi yang menyebabkan penulis secara tidak sadar menyensor dirinya sendiri. Selain itu, terkadang narator berperan layaknya menara pengawas yang berusaha menertibkan dan mendisiplinkan para tokoh. Internalisasi kekuasaan menyebabkan kekuasaan merasuk pada diri penulis atau subjek dan tercermin dalam karya sastra dengan ditunjukkan bahwa tokoh-tokoh terkait secara otomatis mendisiplinkan dirinya sendiri tanpa adanya pengawasan langsung dari negara. Dari uraian tersebut efek panoptikon sangat berhubungan dengan karya sastra karena tidak hanya mempengaruhi penulis sebagai subjek, tetapi juga dapat merasuk dalam diri setiap tokoh dalam karya sastra.

## METODE PENELITIAN

Untuk mengkaji *cerkak* tersebut digunakan metode kualitatif yaitu menyajikan analisis dalam bentuk kalimat dengan objek material primer berupa *cerkak* berjudul *Seksi saka Menara* karya Suparto Brata dan objek material sekunder berupa hasil penelitian mengenai kondisi sosial-budaya pada saat *cerkak* tersebut ditulis. Kemudian metode pengumpulan data menggunakan metode membaca cermat dan kajian pustaka. Datanya berupa kutipan-kutipan dari *cerkak* yang menunjukkan mengenai panoptikon dan dihubungkan dengan kondisi sosial-budaya pada masa tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Panoptikon: Paranoia Poniran

Panoptikon dalam *cerkak Seksi saka Menara* pertama kali diperlihatkan ketika tokoh Poniran berniat untuk mengambil tas yang dibuang oleh pelaku dalam kutipan berikut.

*Bareng lampu-lampu stasiun wiwit murub, lan jadwal teka lungane sepur lodhang, Poniran grumut-grumut metu saka 'pagupone', mudhun lemah. Atine dheg-dhegan. Durung-durung sikile wis anyep kabeh. Mripate tansah jlalatan mider sakupenge papan kadurjanaan mau. Bareng pranyata sepi dheweke banjur mlaku sajak kaya wong golek papan panguyuhan, tumuju marang panggonan tas sing dibuwang dening durjana klambi abang mau sore* (Brata, 2000:207).

Ketika lampu-lampu stasiun mulai menyala, dan jadwal kedatangan-keberangkatan kereta kosong, Poniran perlahan-lahan keluar dari "sarangnya", turun ke tanah. Hatinya deg-degan. Belum apa-apa kakinya sudah dingin semua. Matanya senantiasa jelalatan memperhatikan seluruh tempat kejahatan tadi. Ketika sudah sepi dirinya kemudian berjalan seperti orang yang sedang mencari tempat untuk buang air, menuju tempat tas yang dibuang oleh penjahat berbaju merah tadi sore.

Dari kutipan tersebut terlihat bahwa Poniran yang mencoba mengambil barang milik orang lain merasa ketakutan. Selain itu, dirinya juga senantiasa was-was karena secara tidak sadar ia merasa diawasi oleh orang lain. Hal ini berlanjut pada kutipan selanjutnya ketika dirinya merasa di dalam kegelapan terdapat sepasang mata yang mengawasi, sebagai berikut.

*Rumangsane ing panggonan kang peteng, panggonan kang ireng kuwi, ana mripat sing ngawasi* (Brata, 2000:207).

Menurutnya di tempat yang gelap, tempat yang hitam itu, ada mata yang mengawasi.

Padahal dalam kegelapan tindakannya tidak akan terlihat oleh mata dan sesungguhnya dirinya aman dari pengawasan. Akan tetapi, Poniran tetap beranggapan bahwa terdapat sosok yang mengawasi. Dalam hal ini, paranoia Poniran disebabkan oleh adanya efek panoptik. Ini terjadi setelah dirinya melihat pelaku yang menghunuskan pisau ke korban. Efek dari ketakutan yang disebabkan oleh pelaku tertanam dalam diri Poniran yang menganggap bahwa pelaku tidak bermoral, kejam, dan tentu saja lebih kuat dari dirinya. Hal ini dipertegas pada kalimat selanjutnya, yaitu "*lha yen durjana, durjana sing wani merjaya sapatadha-padha ngaurip mau, apa ndadak nuruti subasita kaya ngono?*" (Brata, 2000:207) yang berarti "Lha apabila orang jahat, orang jahat yang berani membunuh sesama makhluk, apa ya harus menuruti aturan seperti itu?". Selain itu, di luar dari ketakutannya terhadap penjahat, terdapat pula hal yang tidak disadari yang mempengaruhi diri Poniran, yaitu agama dan adat istiadat. Baik agama maupun adat istiadat menetapkan standar kebaikan dan keburukan. Agama mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Melihat sehingga apabila berbuat hal yang tidak baik akan dicatat sebagai dosa, sedangkan adat istiadat memberikan hukuman berupa sanksi sosial kepada pelaku. Tindakan Poniran dalam mengambil barang milik orang lain tanpa izin secara tidak disadari memberikan efek panoptikon pada dirinya karena ia mengetahui konsekuensi apabila tindakannya diketahui oleh orang lain.

Setelah kembali ke menara tempatnya bertugas, Poniran kembali memperlihatkan tindakan was-was, sebagai berikut.

*Atine lega bareng bisa bali tekan 'kandhange'... Lawang dikancing. Lho, apa perlune? Padatan rak ora! Sapa arep melbu mrono? Ing ngisor rak wis ana paugeran katulis: Sapa wae ora oleh mlebu kajaba punggawa ing kono! Pasal 551. (Brata, 2000:207).*

Hatinya lega ketika sudah bisa kembali ke 'kandangnya'... Pintu dikunci. Lho, apa pentingnya? Umumnya kan tidak dikunci! Siapa yang akan masuk ke sana? Di bawah kan sudah ada peraturan tertulis: Siapapun tidak boleh masuk kecuali petugas! Pasal 551.

Di tempat yang aman bagi Poniran, yaitu menara jaga, bahkan tempat tersebut dilindungi oleh undang-undang, tidak cukup membuat Poniran merasa aman. Tindakannya dalam mengunci pintu menandakan adanya kecemasan terhadap pandangan luar padahal dia sendiri belum mengetahui isi dari tas tersebut. Dalam hal ini kekuasaan telah tertanam dalam diri Poniran hingga menimbulkan efek panoptikon sehingga dirinya terus-menerus merasa diawasi. Kecemasan atas pengawasan tersebut kembali ditegaskan dalam kutipan selanjutnya, sebagai berikut.

*Dadi lawang dikancing frag! Rumangsane swarane banter! Nanging ireng-ireng kuwi apa?! Oh, bengi! Bengi! Bengi kuwi tansah ndhedhepi batin kang ringkih! Ah, kena apa kok wengine isih dawa? (Brata, 2000:207 - 208).*

Jadi pintu dikunci frag! Menurutnya suaranya keras! Tetapi hitam-hitam itu apa?! Oh, malam! Malam! Malam itu hening menyergap batin yang lemah! Ah, kenapa kok malamnya masih panjang?

Paranoia tersebut diperparah ketika Poniran mencoba membuka tas kulit. Ia senantiasa memperhatikan keadaan sekitar dan meyakinkan dirinya bahwa tidak ada seorang pun di sana. Setelah memastikan keadaan aman ternyata tas tersebut tidak dapat dibuka dan mengharuskan Poniran membuka secara paksa. Pikirannya kembali mempertimbangkan untuk membuka tas dengan paksa, sebagai berikut.

*Nanging priye mbukake? Ya dibethot wae yen pancen kepingin weruh apa isine. Yen weruh terus arep apa? Tas bakal rusak! Yen ora rusak, tas kuwi isih kena dilungsur. Nanging yen Poniran sing nganggo ya disaru wong, ingatase tukang jaga signal sepur wae, kok nggawa tas wong kantor! (Brata, 2000:208).*

Tetapi bagaimana cara membukanya? Ya disobek saja jika memang ingin melihat isinya. Jika sudah lihat kemudian mau apa? Tasnya akan rusak! Jika tidak rusak, tas itu masih bisa diturunkan. Tetapi jika Poniran yang pakai ya dilihat orang tidak pantas, orang hanya tukang jaga sinyal kereta saja, kok membawa tas orang kantor!

Dari kutipan tersebut terlihat bahwa pandangan masyarakat berperan dalam penciptaan tubuh-tubuh patuh. Poniran yang takut dengan hujatan masyarakat kemudian tidak lagi memperdulikan keutuhan tas. Masyarakat sebagai pembawa budaya menerapkan hukuman dengan mengucilkan dan menghujat. Tatapan mereka yang menyelidik menjadi bagian dari sistem panoptikon sehingga menciptakan kondisi ketika tubuh secara tidak sadar telah terselubungi oleh kekuasaan. Kondisi tersebut kemudian menciptakan harmoni dalam masyarakat.

Kondisi paranoia Poniran menjadi semakin buruk ketika dirinya berniat untuk mengambil uang-uang tersebut demi memenuhi kebutuhan perekonomiannya, terutama untuk membayar ujian anaknya. Hal ini ditunjukkan dari kutipan dalam *cerkak* ketika Poniran mencoba mencari informasi mengenai kejadian kejahatan lewat koran untuk melihat ada atau tidaknya informasi

mengenai kehilangan tas dalam berita (Brata, 2000:210). Meskipun tidak ada berita mengenai kehilangan tas uang, tetapi Poniran tetap tidak berani untuk mengambil sedikit dari uang tersebut, sebagai berikut.

*Bengi kuwi dheweke isih dhines bengi. Ora ana owah-owahan apa-apa. Tas dhuwit tetep kuncen ing lemarine. Ora wani mbukak. Ora wani ngenthit. Disrantekake telung dina engkas. Yen nganti gilirane dhines bengi ganti ora ana kedadeyan apa-apa, dheweke bakal nggawa dhuwite mulih. Mbaka sethithik. Tase ora susah katut, mundak ngetarani* (Brata, 2000:210 - 211).

Malam itu dirinya masih jaga malam. Tidak ada perubahan apa-apa. Tas uang tetap terkunci di almarinya. Tidak berani membuka. Tidak berani mengambil. Diperhatikan tiga hari lagi. Jika sampai pada gilirannya jaga malam tidak ada kejadian apa-apa, dirinya akan membawa uangnya pulang. Sedikit demi sedikit. Tasnya tidak perlu dibawa, karena mencolok.

Meskipun pada mulanya Poniran berniat untuk mengambil uang, tetapi niatnya seketika luntur saat dirinya tidak sengaja berpapasan dengan pelaku pembunuhan yang masih berkeliaran. Hal ini membuat Poniran khawatir karena menurutnya bisa saja Sang Pelaku melacak keberadaan dirinya dan tas yang diambilnya di menara sinyal (Brata, 2000:212). Setelah pelaku tertangkap dan Poniran diwawancarai sebagai saksi, dirinya kembali memikirkan siasat untuk membawa pulang uang tersebut. Salah satunya adalah bekerjasama dengan istrinya. Akan tetapi, siasat ini diurungkan yang kemudian timbullah paranoia Poniran kembali, sebagai berikut.

*Pulisi bisa nampa menawa tas isi dhuwit kuwi ditemu wong liya... Apa bener pulisi wis trima? Ora bakal ngurus, ora nyebar telik sandi ngrungok-ngrungokake wong-wong sing dhines ing menara signal, sing endi sing katon owah saka adat sabene? Tuku barang kang ora cocok karo pametune?* (Brata, 2000:213 - 214).

Polisi menerima apabila tas berisi uang itu ditemukan orang lain.. Apa benar polisi sudah menerima? Tidak akan mengurus, tidak menyebar mata-mata mendengar-dengarkan orang-orang yang bertugas di menara sinyal, yang mana yang terlihat berubah dari kebiasaannya? Membeli barang yang tidak sesuai dengan pendapatannya?

Paranoia ini berlanjut dengan pemikiran Poniran yang tidak masuk akal, misalnya ketika dirinya mencoba untuk merancang skenario berpura-pura memenangkan lotre dana sosial, tetapi ia berpikir bahwa dari pusat dapat melacaknya. Kemudian Poniran juga khawatir apabila nomor seri dari setiap uang sudah dicatat oleh polisi sehingga apabila dia mengambil dan membelanjakan uang tersebut, dirinya dapat terlacak. Selain itu, dia juga memikirkan skenario lain, yaitu berhutang pada temannya Sukardal. Akan tetapi, skenario tersebut segera ditepis karena Sukardal juga tidak punya uang sehingga terlihat sangat mencurigakan. Setelah sebulan berlalu ternyata diadakan reka adegan yang membuat Poniran ketakutan, sebagai berikut.

*Jare nganggo adegan tiron, istilaha 'dikeler'. Durjanane sing wis kecekel kae dikon mbaleni kepriye anggone mrejaya kancane! Heh! Kok nganggo ngono barang! Mbok uwis sing salah diukum, sing ilang wong nyatane wis sesasi ora oleh sisik melik, mbok dieklasake!* (Brata, 2000:215).

Katanya melakukan adegan tiruan, istilahnya 'reka adegan'. Penjahatnya yang sudah ditangkap itu disuruh mengulangi bagaimana olehnya membunuh temannya! Heh! Kok harus seperti itu! Sudahlah yang salah dihukum, yang hilang orang nyatanya sudah sebulan tidak ada petunjuk, ya diikhhlaskan saja!

Dari peristiwa reka adegan tersebut membuat Poniran semakin paranoia karena polisi masih berusaha mencari keberadaan tas uang itu. Hal ini menyebabkan dirinya tidak bisa tidur dan terus terbayang-bayang kalau-kalau penjahat itu keluar dari penjara dan mencarinya. Di sini efek panoptikon bekerja bahkan mempengaruhi Poniran yang sedang berada di tempat aman, yaitu rumahnya. Superioritas yang ditunjukkan oleh pelaku dan polisi sebagai penegak hukum membuatnya gundah bahkan sampai membuatnya menyerahkan uang tersebut ke kepolisian.

*Nganti tekan ngarep Kantor Pulisi, ora ana sing ngrebut utawa ngrayah buntelan gawane. Aman! Mangka isine dhuwit telung puluh yuta! Dipasrahake marang pulisi! Karo nyritakake sakabehe. Blaka suta (Brata, 2000:217).*

Sampai di depan Kantor Polisi, tidak ada yang merebut atau menjarah bungkusan yang dibawanya. Aman! Meskipun isinya uang tiga puluh juta! Diserahkan kepada polisi! Juga menceritakan semuanya. Berterus terang.

Dari kutipan tersebut terlihat bahwa panoptikon menjalankan kekuasaan otomatis yang mendorong tubuh untuk bertindak disiplin dan patuh pada kekuasaan. Poniran yang tertekan oleh kekuasaan dilanda ketakutan karena dirinya mengetahui bahwa ia telah berbuat sesuatu yang salah, baik di mata masyarakat, agama, maupun hukum. Oleh karena itu, setelah menyerahkan uang tersebut, ia merasa sangat lega. Hal ini ditunjukkan pada kutipan selanjutnya, sebagai berikut.

*Nanging dina kuwi atine Poniran padhang wae. Entheng... "Kabeh wis kliwat. Ora perlu digetuni. Kuwi kersane Pangeran."... "Ben pinter, kuwi gampang. Ana sekolahe. Nanging satemene sing luwih wigati kuwi wong jujur. Kuwi ora ana sekolahe, ora dianjurake negara... Mangka satemene wong pinter karo wong jujur kuwi uripe kepenak wong jujur. Contone aku dhewe. Karo tengah wulan ini aku dadi wong pinter, wong sugih, uripku gedebagan, atiku jempalikan. Ora ayem. Iki mau aku dadi wong jujur. Dhuwit temon telung puluh yuta dakpasrahake pulisi. Saiki atiku ayem, ora rumangsa diincim-incim maneh" (Brata, 2000:217 - 219).*

Tetapi hari itu hati Poniran terang benerang. Ringan... "Semua sudah berlalu. Tidak perlu disesali. Itu sudah kehendak Tuhan."... "Agar pintar, itu mudah. Ada sekolahnya. Akan tetapi, sesungguhnya yang lebih penting itu orang jujur. Itu tidak ada sekolahnya, tidak dianjurkan negara.. Maka dari itu, sesungguhnya orang pintar dan orang jujur itu hidupnya lebih enak orang jujur. Contohnya aku sendiri. Setengah bulan ini aku jadi orang pintar, orang kaya, hidupku kelabakan, hatiku jumalitan. Tidak tentram. Ini tadi aku menjadi orang jujur. Uang temuan tiga puluh juta kupasrahkan polisi. Sekarang hatiku tentram, tidak merasa dimata-matai lagi.

Dari kutipan di atas terlihat bahwa ketika pihak berwajib secara resmi mengakui bahwa uang dan petunjuk sudah hilang, pikiran dan hati Poniran tidak tenang sehingga membuat ia memutuskan untuk menyerahkan tas berisi uang ke polisi sepenuhnya. Padahal pada hari sebelumnya, Poniran mendengar dari istri dan anaknya bahwa berita terbaru menyebutkan bahwa polisi secara resmi menyatakan bahwa tas uang tersebut hilang dan semua petunjuk sudah buntu. Pasalnya, area TKP adalah ruang terbuka. Selain itu, rerumputan di sekitar rel sudah rata diinjak-injak para penumpang kereta express sehingga diasumsikan bahwa dalam keramaian itu seseorang membawa tas dan sudah tidak bisa dilacak. Walaupun demikian, Efek panoptik yang mencengkeram Poniran memunculkan paranoia yang mengakibatkan ia berasumsi hal-hal yang tidak-tidak.

## Panoptikon: antara Negara, Panoptikon, dan Cerkak

*Cerkak* berjudul *Seksi saka Menara* dimuat di majalah Jaya Baya pada 24 April 1983. Untuk dapat menganalisis *cerkak* ini perlu diketahui mengenai latar waktunya karena dihubungkan dengan kondisi politik yang terjadi. *Cerkak* ini tidak menunjukkan secara pasti mengenai latar waktu terjadinya cerita, tetapi dapat dipastikan apabila cerita tersebut berlatar setelah kemerdekaan Indonesia, kira-kira tahun 1947 (setelah masa bersiap) sampai tahun 1983. Hal ini dikarenakan tidak adanya tokoh-tokoh Belanda maupun Jepang di dalamnya. Selain itu, pada *cerkak* disebutkan bahwa saat itu telah memasuki zaman kemerdekaan (Brata, 2000:219). Kemudian perkiraan masa tersebut dipersempit lagi, yaitu setelah Agresi Militer II berakhir tepatnya pada tahun 1949 karena dalam situasi berperang polisi lebih fokus pada pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pada *cerkak* juga menyebutkan mengenai kata “sekolah SMA” (Brata, 2000:208). Hal ini mengerucutkan tahun latar waktu *cerkak* karena menurut Direktorat Pembinaan SMA (2017:viii), istilah SMA mulai digunakan pada tahun 1961 setelah sebelumnya menggunakan istilah SMOA. Perkiraan tahun ini dipersempit kembali dengan adanya “lotre dana sosial” yang disebutkan Poniran (Brata, 2000:214). Lotre dana sosial ini adalah sebuah program pemerintah yang disebut sebagai Undian Harapan diselenggarakan oleh Yayasan Rehabilitasi Sosial pada tahun 1974. Program ini cukup menuai kontroversi di masyarakat karena dianggap sebagai “judi legal”. Sebelum tahun 1974 sudah terdapat aturan, yaitu pada UU Nomor 22 Tahun 1954 mengenai ketentuan undian berhadiah. Akan tetapi, program “judi legal” ini baru dimulai pada tahun 1974.

Program ini dihentikan pada tahun 1978 akan tetapi dibuka lagi dan berganti nama menjadi KSSB pada tahun 1979. Pada saat yang bersamaan sejak tahun 1974 terdapat juga program bernama PORKAS dibawah Komisi Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Skema PORKAS adalah pemerintah menjual kupon kepada masyarakat dan masyarakat harus mengisi “prediksi” sebuah pertandingan seperti tim mana yang menang dan skor akhir (misal 3-1, 1-0, dsb), apabila benar maka akan mendapatkan hadiah uang beberapa kali lipat dari harga kupon. Program ini pada akhirnya ditiadakan setelah terjadi protes besar-besaran se-Indonesia. Selain itu sejak awal didirikan, program ini dikepalai oleh Robby Sumampow, seorang mafia penyelundup mobil mewah yang dekat dengan Soeharto (Muhid, 2024). Dari penjelasan tersebut sesuai dengan “lotre dana sosial” yang tertulis dalam *cerkak* sehingga dapat dipastikan bahwa *cerkak* mengambil latar waktu pada era pemerintahan Presiden Soeharto kira-kira pada tahun 1974 sampai 1983.

Pada era Orde Baru terdapat kontrol kepada masyarakat melalui apparatus negara yang juga mendominasi semua bidang kehidupan termasuk sosial, ekonomi, dan politik (Pratikno, 1998:19). Hal ini menyebabkan sentralisasi kekuasaan di Indonesia yang dikendalikan oleh militer. Lebih jelasnya, Pratikno (1998:20) menjelaskan bahwa kekuasaan Orde Baru tersebut dilandasi oleh empat hal utama, yaitu represi hukum dan fisik, praktik klientelisme di bidang ekonomi, wacana politik partikularistik yang memperkuat otoritarianisme, serta pembentukan korporatisme negara. Dalam represi, kekerasan menjadi sarana utama dalam menegakkan konsolidasi politik pada awal tahun 1970-an. Aktivitas politik dibatasi agar menghilangkan ancaman stabilitas politik, dan kekuatan oposisi dilucuti. Demi mencapai upaya tersebut, diciptakan berbagai badan intelijen seperti BAIS dan Kopkamtib (berubah menjadi Bakorstranas) yang membuka kesempatan bagi militer untuk mengatur negara sesuka hatinya (Tanter, 1990:220). Pada tahun 1969, ditetapkan UU Anti-Subversi (UU no 5/1969) untuk mengamankan semua bentuk kegiatan yang mengancam eksistensi pemerintah. Permasalahannya adalah dikarenakan tidak ada cakupan atau standar konkrit mengenai tindakan subversif, maka UU ini

menjadi “pembenaran” atau justifikasi tindakan ABRI terhadap mereka yang tidak setuju dengan pemerintah (Pratikno, 1998:21). Banyak sekali aktivis maupun warga biasa yang menjadi korban dari UU karet ini karena tidak adanya tolok ukur yang jelas maka membuka interpretasi yang leluasa untuk melakukan tindakan represif oleh aparaturnegara.

Tidak hanya secara represi hukum, klientelisme ekonomi memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara di sektor ekonomi. Diberlakukannya sentralisasi sumber daya alam oleh negara dan elit politik menjadikan pilar perekonomian utama untuk negara. Kepengurusan SDA-SDA ini juga diberikan kepada elit politik yang loyal kepada negara, dan sebaliknya, mereka yang tidak loyal diberikan sanksi maupun kesulitan-kesulitan lainnya. Pemerintah Daerah maupun pebisnis yang setia terhadap negara juga diberikan keistimewaan politis seperti penguasaan proyek-proyek negara dan keleluasaan untuk melakukan korupsi uang negara (Pratikno, 1998:22). Tidak hanya pelaku elit politik atau pejabat saja, diciptakan ketergantungan masyarakat dan individu kepada negara. Seperti misalnya pegawai negeri digaji dengan rendah dan membuat mereka sulit untuk hidup pantas sehingga mau tidak mau tergantung kepada pemasukan tambahan dari proyek-proyek yang terkadang dilungsurkan oleh pusat ke daerah. Para pelaku bisnis juga dibatasi oleh peraturan-peraturan yang memihak pusat, tetapi dapat memperoleh keleluasaan apabila memiliki kedekatan politik dengan pusat, seperti contohnya Robby Sumampow dengan bisnis judinya.

Selanjutnya, wacana partikularistik digunakan untuk melegitimasi otoritarianisme yang berwujud Demokrasi Pancasila. Dari Demokrasi Pancasila tersebut keabsahan pemerintah Orde Baru dibangun tidak sekadar secara moral, tetapi dengan cara mempermainkan moralitas (Pratikno, 1998:23). Dua mekanisme kontrol sebelumnya lebih menekankan pada perilaku politik, sedangkan wacana partikularistik ini menekankan pada politik wacana yang mempengaruhi persepsi dan pola pikir. Pemerintah menetapkan wacana “pembangunan” yang sebenarnya bertujuan untuk menindas rakyat kecil bahkan atas nama “stabilitas politik” pemerintah berhak untuk membungkam suara-suara kritis terhadap demokrasi dan menindas masyarakat kecil yang kontra dengan negara. Wacana tersebut berhasil dibangun dan menjadi wacana dominan yang selanjutnya menyingkirkan wacana-wacana alternatif atau *counter discourse* dari kaum intelektual dan aktivis politik (Pratikno, 1998:24). Hal ini menyebabkan militer semakin menguasai panggung politik hingga tercetuslah dwifungsi ABRI yang menempatkan militer dalam posisi-posisi strategis negara.

Pilar nomor empat dari tangan besi orde baru adalah korporatisme negara. Pemerintah membuat organisasi-organisasi profesi yang bertujuan untuk mobilisasi politik. Tiap organisasi harus melakukan kontrol terhadap anggotanya dan memobilisasi dukungan terhadap pusat. Organisasi ini adalah KADIN, KORPRI, PWI, Golkar, dan sebagainya. Kekuasaan absolut pemerintah ditunjukkan dengan organisasi-organisasi yang menjadi perwakilan kelompok yang sah, seperti organisasi buruh hanya diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dan wartawan dengan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Pada tahun 1989, pemerintah menyatakan bahwa hanya PWI yang dapat mengeluarkan kartu pers bagi wartawan dan staf inti PWI yang loyal dengan pemerintah berfungsi sebagai ‘penjaga gerbang’ untuk kontrol akses informasi. Para pengusaha atau pebisnis yang ingin terlibat dalam proyek tender pemerintah, harus bergabung menjadi anggota KADIN. Kemudian, pemerintah melalui Golkar dan KORPRI menjamin dukungan terhadap negara melalui mobilisasi voting anggota-anggotanya setiap pemilihan presiden.

Dari penjelasan mengenai kondisi negara pada era Orde Baru tersebut, maka *cerkak Seksi saka Menara* sebagai representasi dari kondisi sosial-politik pada masa itu menggambarkan kekuasaan yang tertanam kuat dalam diri setiap tubuh. Paranoia yang diperlihatkan oleh Poniran terhadap polisi berhubungan dengan adanya trauma terhadap pembantaian massal dan juga kekuatan absolut angkatan bersenjata Indonesia. Negara menancapkan kekuasaan tidak hanya melalui hal-hal yang “halus”, tetapi juga dipertegas dengan adanya hukum dan dominasi angkatan bersenjata. Masyarakat yang dianggap menentang negara bisa tiba-tiba dihilangkan atau “dibungkam”. Hal ini tertampil dalam *cerkak* ketika Poniran berkata mengenai “*telik sandi*” atau mata-mata (Brata, 2000:214). Adanya empat pilar kekuasaan rezim Orde Baru tersebut memperkuat efek panoptik di masyarakat. Negara tidak hanya menancapkan kuasa pada politik, tetapi menyebarkan wacana yang mempermainkan rakyatnya. Hal ini diperlihatkan dalam kutipan *cerkak*, sebagai berikut.

*“Nanging, tetep wae ora bisa mragadi. Ubengane urip ing negara iki angel, se! Nanging ya, ya ora papa! Ora papa!”... “Wis kliwat Kenthut ora lulus ing ujian negeri, ora kewragadan. Yen wis kliwat kuwi ateges kersane Pangeran mengkono. Dadi ya kudu ditrima.”* (Brata, 2000:217).

“Tetapi, tetap saja tidak bisa membiayai. Perputaran hidup di negara ini sulit! Tetapi ya, ya tidak apa-apa! Tidak apa-apa!”... “Sudah terlewat Kenthut tidak lulus ujian negeri, tidak terbiayai. Jika sudah terlewat itu maknanya kehendak Tuhan demikian. Jadi ya harus diterima”.

Dari perkataan tokoh Poniran tersebut dapat dilihat bahwa kesulitan yang dialami oleh keluarganya perlu diterima dengan lapang dada dan berserah pada Tuhan. Padahal apabila diperhatikan pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat kalimat yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Akan tetapi, Poniran sendiri yang merupakan orang yang bekerja untuk negara ironisnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup keluarganya bahkan ketika ada kesempatan untuk mengambil sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya pun, ia tidak melakukannya karena kuatnya efek panoptik yang mencengkeram dirinya. Dalam *cerkak* ini, sama sekali tidak disebutkan kritikan terhadap pemerintah. Gaya penulisan dari sang penulis pun terkesan pasif dan tersentral pada penderitaan pribadi dari para tokoh. Salah satu alasan utama adalah adanya tindakan penyensoran karya-karya sastra maupun media lainnya yang dipublikasikan pada masa tersebut. Contoh lain dari usaha pembungkaman seni dilakukan negara terhadap Rhoma Irama pada saat ia merilis lagu *Judi!* yang secara langsung mengancam bisnis Porkas dan KSSB milik pemerintah. Akibatnya ia dilarang untuk tampil di televisi pemerintah. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah orde baru dalam melakukan kontrol kuasa dan menanamkan efek panoptik di masyarakat.

## KESIMPULAN

Efek panoptikon yang bekerja di masyarakat tercermin dalam *cerkak Seksi saka Menara*. Efek tersebut tidak hanya disebabkan oleh agama dan adat-istiadat, melainkan juga adanya pengaruh kekuatan kuasa negara. Selain itu, hal ini tergantung pada individu dengan berbagai latar belakangnya. Dalam *cerkak*, Poniran hanya terpengaruh sedikit dari sisi agama, sisanya didominasi oleh adat-istiadat dan negara. Efek dari kuasa tersebut menciptakan Poniran sebagai bagian dari tubuh-tubuh patuh yang selalu merasa diawasi bahkan di tempat yang paling aman.

Pendisiplinan tubuh-tubuh menciptakan efek panoptikon yang berhasil menerapkan kekuasaan otomatis yang digambarkan dengan paranoia Poniran.

Penyelidikan latar waktu dari penulisan *cerkak* tersebut menunjukkan era Orde Baru yang melegitimasi tindakan-tindakan berlebihan Poniran. Orde Baru yang otoriter dengan didukung oleh pasukan militer bersenjata berhasil mempengaruhi masyarakat, tidak hanya dengan tindakan-tindakan yang memicu ketakutan, tetapi juga dengan wacana-wacana yang disebar. Hal ini memperkuat kedisiplinan pada tubuh-tubuh patuh secara tidak disadari sehingga efek panoptikon semakin besar di masyarakat. Efek dari kekuasaan tersebut juga mempengaruhi penulis yang tidak berani mengkritik pemerintah dan pada *cerkak* tersebut cenderung menuliskan kemiskinan dengan kondisi pasrah. Penyensoran ini secara sadar maupun tidak sadar dipengaruhi oleh negara dalam menancapkan kekuasaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bentham, J. (1791). *Panopticon; or The Inspection House*. London: T. Payne.
- Brata, S. (2000). *Trem Antologi Crita Cekak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Brunon-Ernst, A., et.al. (2023). *Surveillance, Law and the Humanities*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Direktorat Pembinaan SMA. (2017). *Profil SMA Sekolah Menengah Atas dari Masa ke Masa*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMA
- Edkins, J., Nick V.W. (2019). *Teori-Teori Kritis Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: A Division of Random House, Inc.
- Foucault, M. (1978). *The History of Sexuality Volume I: An Introduction*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, M. (2017). *Power/Knowledge (Wacana Kuasa/Pengetahuan)*. Yogyakarta: Narasi.
- Iqbal, M. (2019). Pelarangan Buku di Indonesia Era Orde Baru: Perspektif Panoptikon Michel Foucault. *Jurnal Agasty*, 9(1), 56 – 78. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v9i1.3591>
- Mills, S. (2001). *Discourse*. London and New York: Taylor & Francis e-Library.
- Muhid, H.K. (2024, Juli 5). "Sebelum Judi *Online*, Pemerintah Pernah Legalkan Judi Porkas dan SDSB yang Dikelola Robby Sumampow dan Robby Tjahyadi". *Tempo*. <https://www.tempo.co/arsip/sebelum-judi-online-pemerintah-pernah-legalkan-judi-porkas-dan-sdsb-yang-dikelola-roby-sumampow-dan-roby-tjahyadi-42855>
- Nurul Bashirah. (2018). *Wacana Kekuasaan dalam Sistem Panoptikon pada Sibyl System yang Tercermin dalam Anime Psycho-Pass Karya Gen Urobuchi* [Sarjana Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang] <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/166263/>
- Pratikno. (1998). Keretakan Otoritarianisme Orde Baru dan Prospek Demokratisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2), 18 - 33. <https://doi.org/10.22146/jsp.11152>
- Semple, J. (1987). Bentham's Haunted House. *The Bentham Newsletter* 11: 35-44.
- Tanter, R. (1990). The Totalitarian Ambition: Intelligence Organisations in the Indonesian State. Dalam Arief Budiman (Ed.), *State and Civil Society in Indonesia* (pp. 213-288). Clayton, Victoria: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/50408>